

Suara Rakyat Bukan Suara Tuhan: Demokrasi, Kekuasaan, dan Etika Kepemimpinan

(Tinjauan dari aspek filosofi Bugis)

Kita diajarkan di sekolah dulu: vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan). Kedengarannya demokratis, tapi kalau dipikir dalam-dalam, itu justru berbahaya. Karena kalau sudah dianggap suara Tuhan, siapa yang berani menguji? Siapa yang berani bilang salah?

Dalam demokrasi, suara rakyat adalah sumber legitimasi yang sangat penting. Namun, ada satu hal yang perlu terus kita ingat: suara rakyat bukan suara Tuhan.

Kalimat ini bukan untuk merendahkan rakyat, apalagi menolak demokrasi. Justru sebaliknya, ia menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan akal sehat, etika, hukum, dan nilai moral agar kekuasaan yang lahir dari suara mayoritas tidak berubah menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang.

Di sisi lain, kita juga perlu berhati-hati terhadap jebakan yang berlawanan: ketika seorang pemimpin merasa

dirinya selalu benar hanya karena memiliki jabatan, mandat politik, atau dukungan kekuasaan.

Dengan demikian, ada dua jebakan yang sama-sama berbahaya dalam politik: kultus mayoritas dan kultus pemimpin.

Keduanya menggunakan legitimasi untuk membungkam kritik. Yang satu berkata, "Ini kehendak rakyat, maka pasti benar." Yang lain berkata, "Dia adalah pemimpin, maka jangan banyak bertanya." Padahal, keduanya sama-sama berbahaya ketika legitimasi kekuasaan mulai dianggap sebagai ukuran kebenaran.

Legitimasi Bukan Kebenaran Moral

Demokrasi adalah mekanisme untuk menentukan siapa yang memperoleh mandat untuk menjalankan



Oleh
Irham Ihsan, S.H., M.Si
Ketua Sompung Lolona Cenrana

kekuasaan. Tetapi kemenangan dalam pemilihan tidak pernah menjadi sertifikat bahwa seseorang atau kebijakannya akan selalu benar.

Suara terbanyak memberikan legitimasi politik, tetapi tidak otomatis memberikan kebenaran moral.

Karena itu, keputusan pemerintah tetap harus diuji dengan hukum, keadilan, kepentingan masyarakat luas, dan nilai kemanusiaan. Mayoritas tidak boleh menjadi alasan untuk menindas minoritas. Kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kelompok yang suaranya lebih kecil.

Demokrasi yang sehat bukan sekadar tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga berbicara tentang bagaimana yang menang memperlakukan yang kalah. Sebab

setelah pemilu selesai, mereka yang berbeda pilihan tetap merupakan bagian dari rakyat yang sama.

Ketika "Suara Rakyat" Bisa Dibentuk oleh Kekuasaan

Persoalan berikutnya jauh lebih rumit: Apakah setiap suara rakyat benar-benar lahir secara bebas?

Di era media sosial, algoritma, industri informasi, modal politik, dan biaya kampanye yang besar, opini publik dapat dibentuk, diarahkan, bahkan dimanipulasi. Rakyat memang memilih. Tetapi pertanyaannya: seberapa bebas pilihan itu ketika informasi yang mereka terima sudah lebih dahulu dibingkai oleh kepentingan tertentu?

Di sinilah kita perlu waspada. Apa yang disebut sebagai "kehendak rakyat" kadang-kadang dapat bercampur dengan kehendak pemilik modal, kepentingan kelompok politik, atau kepentingan mereka yang menguasai ruang informasi.

Maka, ungkapan vox populi suara rakyat tidak boleh diterima secara membabi buta sebagai kebenaran. Suara rakyat harus tetap ditempatkan dalam ruang yang sehat: ada informasi yang benar, kebebasan berpikir, kebebasan menyampaikan pendapat, dan kesempatan yang adil bagi masyarakat untuk menentukan pilihan. Jika tidak, demokrasi hanya akan menjadi prosedur lima tahunan, sementara struktur kekuasaan tetap dikuasai oleh kelompok yang sama.

Ketika Kritik Dianggap Sebagai Pembangkangan

Jebakan kedua adalah kultus pemimpin.

Pemimpin memang harus dihormati. Tetapi menghormati pemimpin tidak berarti membenarkan semua tindakan pemimpin. Pemimpin yang tidak bisa dikritik justru merupakan tanda bahaya bagi demokrasi.

Dalam tradisi Bugis, pemimpin tertinggi sekalipun bukanlah wakil Tuhan. Ia adalah pajung payung.

Fungsi payung adalah melindungi, bukan untuk disembah. Ia ada untuk

memberi keteduhan, menaungi yang lemah, dan menjaga seluruh rakyat yang berteduh di bawahnya. Bukan untuk didewakan, bukan untuk dianggap sempurna, dan bukan untuk dijadikan kebenaran mutlak.

Dan karena ia hanyalah payung benda buatan manusia maka ia bisa bocor, bisa sobek, bisa rusak. Jika ia bocor, ia tidak lagi meneduhkan, justru membiarkan hujan dan panas menimpa orang-orang yang seharusnya dilindunginya. Maka tugas rakyat dan pemimpin bersama-sama: memeriksanya, memperbaikinya, bahkan menggantinya jika sudah tak layak pakai.

Ketika bertanya dianggap kurang ajar, kritik dianggap makar, perbedaan pendapat dianggap permusuhan, dan loyalitas kepada pemimpin lebih dihargai daripada kejujuran maka ruang publik sedang mengalami masalah serius.

Pemimpin sejati tidak membutuhkan rakyat yang selalu mengatakan “iya”. Pemimpin justru membutuhkan orang-orang yang berani mengatakan “tidak”

ketika kebijakan yang diambil berpotensi merugikan masyarakat.

Sebab pengawasan bukan bentuk kebencian kepada pemimpin. Kritik bukan selalu bentuk permusuhan. Terkadang, kritik adalah bentuk kepedulian agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas. Kekuasaan yang sehat adalah kekuasaan yang bersedia diawasi.

Kearifan Bugis: *Gau', Lempu' na Ada Tongeng*

Dalam konteks inilah kearifan Bugis memiliki relevansi yang kuat. Ada tiga nilai yang dapat menjadi kompas kehidupan publik: *Gau, Lempu', na Ada Tongeng*.

- *Gau'* = perbuatan atau tindakan
- *Lempu'* = kejujuran dan kelurusan
- *Ada Tongeng* = perkataan yang benar

Ketiganya tidak bertanya berapa persen suara yang diperoleh seseorang. Tidak juga bertanya setinggi apa jabatan seseorang. Pertanyaannya sederhana: Apakah perbuatannya baik? Apakah niat dan

tindakannya lurus? Apakah perkataannya benar?

Inilah ukuran yang seharusnya tetap hidup dalam politik. Jabatan dapat berubah. Kekuasaan dapat berganti. Popularitas dapat naik dan turun. Tetapi nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan seharusnya tidak ikut berubah mengikuti kepentingan politik.

Pappaseng Bugis mengingatkan:

“Tellu riala sapp o: tau'e ri Dewatae, siri'e ri watakkale, lempu'e ri padatta rupa tau.”

Ada tiga hal yang menjadi pagar: takut kepada Tuhan, malu terhadap diri sendiri, dan jujur kepada sesama manusia.

Maknanya sangat dalam bagi kehidupan politik:

- Yang seharusnya ditakuti bukanlah kehilangan jabatan semata, melainkan kehilangan integritas.
- Yang seharusnya membuat seseorang malu bukan karena mendapat kritik, melainkan karena

melakukan kesalahan dan ketidakadilan.

- Yang seharusnya dijaga bukan hanya kesetiaan kepada kelompok, tetapi kejujuran kepada sesama manusia.

Demokrasi Harus Tunduk pada Keadilan

Solusi atas berbagai persoalan politik bukanlah anti-demokrasi dan bukan pula anti-pemimpin. Kita justru membutuhkan demokrasi yang lebih dewasa dan kepemimpinan yang lebih berintegritas.

Demokrasi yang sehat setidaknya harus memberikan tiga ruang:

1. Ruang bagi mereka yang kalah. Mayoritas memiliki mandat, tetapi tidak memiliki hak untuk menindas minoritas.
2. Ruang bagi kritik. Pemimpin memiliki kewenangan, tetapi tidak berarti kebal dari pengawasan dan koreksi.
3. Ruang bagi nilai. Keputusan politik tidak boleh hanya diukur dari popularitas, tetapi juga dari

keadilan, kejujuran, kemanusiaan, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Demokrasi membutuhkan suara rakyat, tetapi suara rakyat juga membutuhkan kompas moral

Mali Siparappe, Rebba Sipatokkong
Pada akhirnya, kehidupan berbangsa tidak boleh dibangun dengan logika “yang kuat menguasai yang lemah” atau “yang banyak selalu benar”. Kita membutuhkan semangat *mali siparappe, rebba sipatokkong*: Ketika ada yang hanyut, kita saling menarik ke tepian. Ketika ada yang jatuh, kita saling menegakkan. Prinsip ini tidak hanya menjadi tugas pemimpin. Ia adalah tanggung jawab seluruh warga negara. Kita boleh berbeda pilihan, berbeda pandangan, mendukung pemimpin yang berbeda tetapi perbedaan itu tidak boleh membuat kita kehilangan rasa kemanusiaan dan keadilan.

Sebab demokrasi bukan sekadar tentang memenangkan suara. Demokrasi adalah tentang bagaimana kekuasaan digunakan setelah suara itu diberikan, maka:

- Suara rakyat harus didengar.

- Pemimpin harus dihormati.

- Tetapi keduanya tetap harus tunduk pada kebenaran, keadilan, dan nilai kemanusiaan.

Suara rakyat bukan suara Tuhan. Pemimpin bukan wakil Tuhan yang selalu benar. Yang harus kita tegakkan adalah kehidupan bersama yang menjadikan *gau', lempu', na ada tongeng* sebagai kompas kekuasaan serta *mali siparappe, rebba sipatokkong* sebagai semangat dalam menjaga sesama.

Karena pada akhirnya, yang membuat sebuah bangsa kuat bukan hanya siapa yang menang dalam pemilihan, tetapi seberapa kuat rakyat dan pemimpinnya menjaga kejujuran, keadilan, dan kemanusiaan setelah kemenangan itu diraih.